

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalani hidup dengan layak ialah contoh hak asasi manusia yang diberi pengakuan di dunia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa salah satu tugas utama pemerintah Republik Indonesia yaitu “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Dengan kata lain, Kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan umum dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan (Rahman Suleman et al., 2021).

Oleh sebab itu, mengurangi jumlah penduduk miskin ialah satu diantara parameter penting dalam keberhasilan pembangunan (Alvianto et al., 2017). Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah (Kakisina, 2016).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak segi karena selain berkenaan dengan segi ekonomi belaka. Tetapi, menjalar pada permasalahan sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Kemiskinan biasanya diuraikan sebagai sebuah keadaan yang mana personal tidak dapat mencukupi hajat dasar hidup misalnya pangan, sandang, papan, pendidikan serta kesehatan atau tidak mempunyai pendapatan yang cukup. Menurut BPS, masyarakat yang kebutuhan dasar minumannya tidak terpenuhi dapat digolongkan sebagai masyarakat yang kurang mampu atau miskin.

Garis dasar kemiskinan merujuk pada pendapatan per kapita minimum sebanyak 2.100 kkal per hari, serta keperluan minimum bukan makanan layaknya kebutuhan perumahan, sandang, sekolah serta transportasi, dan kebutuhan keluarga serta individu lainnya (Asrol & Ahmad, 2018). Garis kemiskinan merupakan jumlah uang yang dibutuhkan (Rupiah) untuk pemenuhan kebutuhan dasar pangan serta non-pangan pada tingkat minimum. Ukuran kemiskinan ada dua jenis, yaitu: (1) kemiskinan absolut, artinya kesulitan seseorang untuk keluar dari garis kemiskinan yang telah ditentukan, dan (2) kemiskinan relatif, yaitu perbedaan tingkat pendapatan dari satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Dua lingkaran perangkap kemiskinan terbagi menjadi dua yakni: penawaran serta permintaan. Sektor penawaran menjelaskan rendahnya kemampuan masyarakat dalam menabung karena rendahnya tingkat produktivitas dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Rendahnya pembentukan modal atau investasi disebabkan oleh rendahnya kemampuan menabung masyarakat, sehingga Tingkat produktivitasnya pun akan rendah dan seterusnya. Pada saat yang sama, dari sisi permintaan terlihat jelas bahwa motivasi untuk penanaman modal atau investasi di negara-negara miskin masih sangat rendah karena terbatasnya pasar sebagai barang. Masalah ini diakibatkan karena pendapatan yang penduduk miliki itu rendah dan ukuran produktivitas yang rendah, keterbatasan pembentukan modal di masa lalu. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya dorongan untuk menanamkan modal (Andhykha et al., 2018).

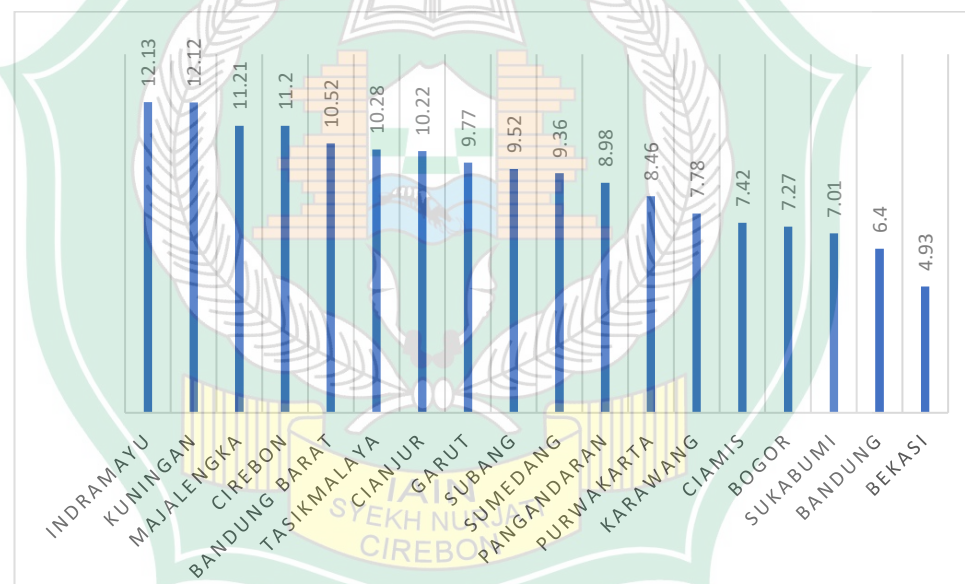
Masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan besar, terpenting di wilayah-wilayah yang pembangunan ekonominya kurang merata sehingga menyembunyikan fakta kemiskinan sehingga menyebabkan indeks tingkat keparahan kemiskinan dan indeks tingkat kedalaman kemiskinan semakin tinggi di setiap daerah. Penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah di Kabupaten/Kota memperlihatkan integritas yang kokoh sebagai kepala daerah.

Meskipun pemerintah pusat serta daerah telah berupaya mengimplementasikan kebijakan serta program dalam mengatasi kemiskinan, namun permasalahannya yaitu hasil yang positif belum tercapai karena

pelaksanaannya belum memberikan dampak yang signifikan. Karena kebijakan serta program pengentasan kemiskinan masih terfokus pada program sektoral, masih terdapat kesenjangan antara rencana dan sasaran.

Oleh sebab itu, diperlukan rencana pengentasan kemiskinan yang menyeluruh untuk mengatasi masalah ini sepenuhnya. Seseorang atau kelompok yang tidak dapat mengelola hidupnya hingga mencapai suatu standar dianggap memiliki kondisi kurang mampu. Kemiskinan mencakup aspek politik, sosial budaya dan psikologis, ekonomi serta akses terkait dengan sumber daya. Dimensi-dimensi itulah saling berkaitan satu sama lain dan saling berkaitan atau terbatas. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, isolasi dan kurangnya kemandirian (Azmi, 2019).

Grafik 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dapat dilihat dalam grafik 1.1 diatas, bahwa pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon menduduki peringkat ke empat dari 18 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dibawah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Sehingga Bagi Kabupaten Cirebon, kemiskinan merupakan salah satu dari isu strategis yang mendapat prioritas untuk penanganan pada setiap tahapan pelaksanaannya.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) dan Persentase Penduduk Miskin (Persen) di Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2009	390.50	18.22%
2010	333.30	16.12%
2011	328.60	15.56%
2012	311,30	14,96%
2013	307,20	14,96%
2014	300,50	14,65%
2015	313,21	14,77%
2016	288,49	13,49%
2017	279,60	12,97%
2018	232,37	10,70%
2019	217,64	9,94%
2020	247,94	11,24%
2021	271,02	12,30%
2022	266,10	12,01%
2023	249.18	11.02%

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berlandaskan pada pada Tabel 1.1 menampilkan bahwa dari tahun 2009 hingga tahun 2023 jumlah penduduk miskin serta persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon tidak selalu menurun tetapi cenderung berfluktuasi (mengalami kenaikan dan penurunan). Namun jika dibandingkan dengan tahun 2009 jumlah serta persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sudah mengalami penurunan dari 390.50 ribu jiwa atau 18.20% di tahun 2012 menjadi 249.18 ribu jiwa atau 11.02% di tahun 2023. Pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan persentase penduduk miskin yang signifikan akan tetapi tiga tahun terakhir yakni tahun 2020-2021 persentase masyarakat miskin yang

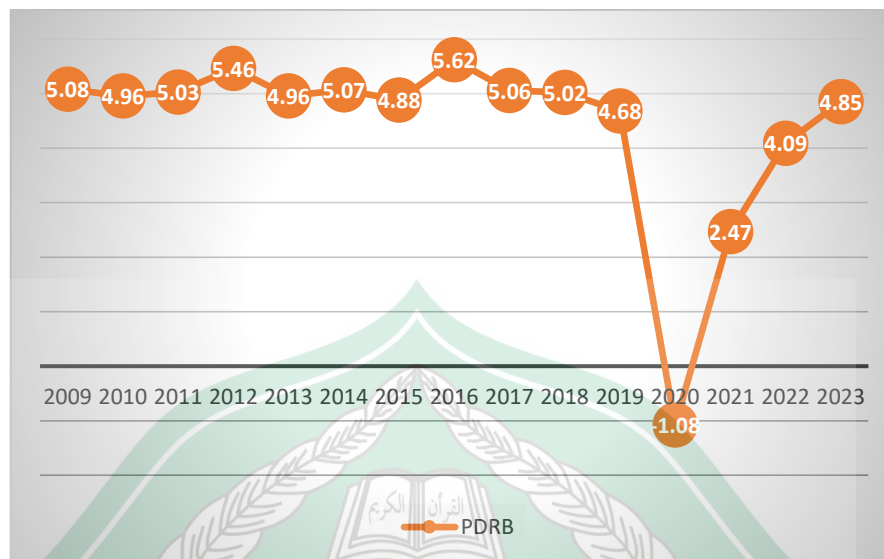
ada di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama tahun 2020. Kemudian di tahun 2023 kembali mengalami penurunan.

Permasalahan strategis di Pemerintahan Kabupaten Cirebon tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (*Problem Nasional*), yakni masih tingginya angka kemiskinan jika di bandingkan dengan kabupaten lain di provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu menurut (Elvira et al, 2023) penyebabnya adalah produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia karena pemerataan dan pendistribusian hasil PDRB yang adil akan memberikan manfaat pembangunan yang merata di semua sektor lapangan pekerjaan yang mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di daerah. Hal ini pun akan berdampak pada kualitas sektor pendidikan dan layanan kesehatan yang tentunya membantu meningkatkan pembangunan manusia. Sedangkan menurut (Zaqiah et al., 2023) faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan yaitu pendidikan, pengangguran dan jumlah penduduk. Rendahnya pendidikan dan pengangguran berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengembangkan kehidupan mereka. Masyarakat tentunya menginginkan kehidupan yang layak seperti tercukupinya sandang sehingga bisa mencapai kehidupan yang layak (di atas garis kemiskinan).

Pengentasan kemiskinan pada suatu negara atau wilayah merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ini adalah dengan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dimiliki. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahman Suleman et al., 2021).

**Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Cirebon (Persen)
Tahun 2009-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan grafik 1.2 bisa dilihat Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan di Kabupaten Cirebon mengalami fluktuasi pada tahun 2009 hingga tahun 2023. Laju pertumbuhan PDRB terendah yaitu di tahun 2020 sebesar -1.08. Adapun penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 disebabkan oleh Wabah Covid-19 yang timbul sehingga memicu banyak bidang usaha yang gulung tikar sehingga laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menjadi negatif. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB tertinggi yaitu di tahun 2016 sebesar 5.62%, jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi selama kurun waktu 15 tahun terakhir yaitu 2009-2023. Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2023 dihasilkan oleh Transportasi & pergudangan; Jasa Pendidikan; Jasa Perusahaan; Penyediaan akomodasi & makanan minuman.

Selain itu juga, pendidikan semestinya memainkan peran krusial dalam mengentaskan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon maupun di wilayah lain dengan secara tidak langsung dengan memberikan peningkatan dalam produktivitas serta efisiensi secara keseluruhan dan secara langsung dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat miskin mengenai keahlian yang

diperlukan guna pendapatan serta produktivitas masyarakat meningkat dari waktu ke waktu (Susanto & Pangesti, 2019).

Pendidikan menjadi kunci dalam mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan optimal. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan penerus yang pintar dikarenakan pendidikan merupakan misi utama dalam Pembangunan sosio-ekonomi. Pendidikan pula dianggap sebagai bekal manusia, dimana wawasan serta keterampilan didapat melewati berbagai program, mulai dari tahap anak-anak hingga pelatihan dan pekerjaan bagi dewasa. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada seseorang maka berdampak positif pada produktivitasnya saat ini, menciptakan hubungan langsung antara tingkat pendidikan dan kinerja kerja (Cahyani & Muljaningsih, 2022).

Grafik 1.3 Rata-Rata Lama Sekolah (Pendidikan) di Kabupaten Cirebon



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Bisa dilihat pada grafik 1.3 bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Cirebon dari tahun 2009-2023 angkanya berfluktuatif. Di tahun 2009 tumbuh sejumlah 6.67 akan tetapi di tahun 2010 terjadi penurunan. Kemudian di tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 berangsur-angsur meningkat. Dapat disimpulkan juga bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Cirebon pendidikan terendah yang mampu ditempuh yaitu sampai dengan kelas 6 Sekolah Dasar dan pendidikan tertinggi yang mampu ditempuh yaitu sampai dengan kelas 7-8 Sekolah Menengah Pertama. Hal ini masih jauh dari kebijakan

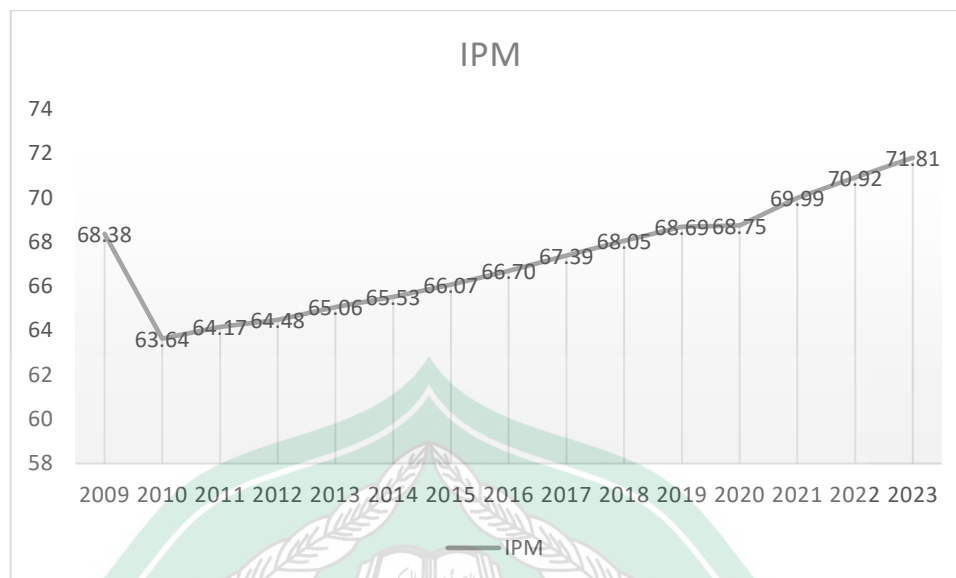
pemerintah yang mewajibkan 12 tahun belajar sehingga dapat mengakibatkan banyak penduduk terutama penduduk miskin yang mungkin akan memiliki keterbatasan dalam pengembangan diri, kurang mampu mengelola keuangan dan kurangnya mengikuti perkembangan yang ada.

Menurut Muqorrobin & Soejoto (2017), Perhitungan dalam HDI yakni dengan membandingkan harapan hidup, tingkat melek huruf berdasarkan pendidikan terakhir, dan kemampuan beli masyarakat di seluruh negara di dunia. Menurut *United Nation Development Program*, IPM ialah menggabungkan beberapa indikator, yakni indeks kesehatan (angka harapan hidup), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah) dan indeks kemampuan beli (pengeluaran riil yang disesuaikan). Ketiga indikator digunakan dalam menggambarkan persentase kemakmuran serta keberhasilan masyarakat di suatu wilayah.

Dalam persoalan pembangunan ekonomi suatu wilayah, *Human Development Index* merupakan satu diantara parameter kunci dalam kerangka dasar pembangunan daerah. Persoalan ini menunjukkan pentingnya IPM dalam manajemen pembangunan wilayah. Fungsi IPM bersama tolak ukur *human development* lainnya menjadi dasar dalam merumuskan tujuan pembangunan serta perencanaan rencana (Sayifullah & Gandasari, 2016).

Indeks Pembangunan Manusia ialah parameter penting dalam mengukur kemajuan suatu daerah, dan seharusnya berkorelasi positif dengan Tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Dikarenakan suatu wilayah dengan IPM yang tinggi sehingga akan mempunyai kualitas hidup masyarakat yang tinggi pula. Apabila nilai IPM tinggi maka dapat dikatakan tingkat kemiskinan masyarakatnya rendah (Sayifullah & Gandasari, 2016).

**Grafik 1.4 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cirebon
Tahun 2009-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dilihat dalam grafik 1.4, terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2009-2023 di Kabupaten Cirebon. Nilai Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Kabupaten Cirebon yaitu terjadi pada tahun 2023 sebesar 71.81 sedangkan yang terendah yaitu terjadi pada tahun 2010 sebesar 63.64. Pada tahun 2009, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cirebon menyentuh angka 68.38 akan tetapi di tahun 2010 mengalami penurunan signifikan tapi tidak berlangsung lama karena setelah itu, angka indeks pembangunan manusia meningkat dari waktu ke waktu, dan di tahun 2023, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cirebon mencapai 71.81%, maka seharusnya persentase penduduk miskin akan menurun.

Studi ini memang sudah lama digunakan oleh banyak peneliti. Akan tetapi, temuan studinya yang tidak selaras misalnya pada penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Ritonga & Wulantika, 2020) & (Arissyiah Alifvia Putri, 2023) yang menemukan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian dari (Cembawan Wijaksana, 2022), yang menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh serta tidak berdampak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Kemudian penelitian dari (Cahyani & Muljaningsih, 2022) & (Tjiabrata et al., 2021), menemukan jika pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut berkebalikan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Sholikhah et al., 2021), menemukan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Selanjutnya hasil penelitian dari (Hartina, 2020) & (Azmi, 2019), menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Goni et al., 2022) yang menemukan jika variabel indeks pembangunan manusia secara parsial memiliki pengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Perbedaan dari temuan penelitian tersebut sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan topik yang berhubungan dengan tingkat kemiskinan. Adapun judul penelitian ini yakni **"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Cirebon"**

B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang penulis dapatkan yaitu:

1. Masalah utama yang ada di Indonesia yaitu kemiskinan, utamanya di wilayah dengan pembangunan perekonomian yang belum merata.
2. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon nilai berfluktuasi di tahun 2009 sampai 2023. Bahkan di tahun 2023, Kabupaten Cirebon menduduki peringkat ke 4 dari 18 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi serta kemiskinannya masih menjadi permasalahan yang relatif besar.
3. Di tahun 2010 hingga tahun 2023, di Kabupaten Cirebon sendiri Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

4. Pendidikan yang rendah, Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang berfluktuatif, serta IPM dapat dijadikan sebagai faktor dari kemiskinan itu sendiri.
5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Cirebon yang sifatnya juga fluktuatif dengan penurunan yang sangat signifikan dirasakan di tahun 2020 sebesar -1.08.
6. Di tahun 2009-2023, penduduk Kabupaten Cirebon rata-rata penduduk Kabupaten Cirebon pendidikan terendah yang mampu ditempuh yaitu sampai dengan kelas 6 Sekolah Dasar dan pendidikan tertinggi yang mampu ditempuh yaitu sampai dengan kelas 7-8 Sekolah Menengah Pertama.

b. Batasan Masalah

Agar lebih fokus dengan penelitiannya, maka penulis membatasi terhadap pembahasan, yaitu:

1. Data kemiskinan yang dipakai yaitu Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2023.
2. Data PDRB yang digunakan ialah data PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Cirebon tahun 2009-2023.
3. Data pendidikan yang dipakai ialah rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon tahun 2009-2023.
4. Data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cirebon yang digunakan ialah data tahun 2009-2023.

c. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis fokus pada penelian yang penulis lakukan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon?

3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon?
4. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon?

d. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini menyesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, dengan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon.
4. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berharap bisa diperoleh manfaat bagi masyarakat ataupun pemerintah serta pihak-pihak terkait guna menambah wawasan yang berkaitan pada perkembangan serta kemajuan pendidikan ekonomi makro yang berhubungan dengan variabel produk domestik regional bruto, pendidikan serta indeks Pembangunan manusia yang mempengaruhi Tingkat kemiskinan. Berikut merupakan manfaat yang ada pada penelitian ini.

1. Aspek Teoritis

Dapat memberikan tambahan informasi serta perbandingan untuk seluruh pihak yang akan melaksanakan penelitian yang sama dan diharapkan bermanfaat bagi perkembangan studi terutama di bidang

PDRB, Pendidikan, IPM serta kemiskinan sehingga dapat dijadikan bahan rujukan pada penelitian kedepannya.

2. Aspek Praktis

1. Bagi Peneliti

Untuk memperluas ilmu pengetahuan serta meningkatkan kapasitas berpikir peneliti tentang Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2023.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai elemen yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini juga agar bisa jadi salah satu rujukan penting dalam penelitian lanjutan tentang isu-isu terkait kemiskinan yang disebabkan oleh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cirebon.

4. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian tersebut berharap bisa diperoleh informasi bahwa menetapkan tingkat kemiskinan harus sesuai pada parameter pengukuran kemiskinan.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dari masalah, batasan dari masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab kedua menguraikan berbagai macam teori atau studi kepustakaan yang kaitannya dengan objek penelitian, yang meliputi teori tingkat kemiskinan, produk domestik regional bruto, pendidikan dan indeks

pembangunan manusia. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga menguraikan mengenai metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti, mulai dari lokasi dan waktu penelitian, metode dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menguraikan tentang deskripsi kabupaten Cirebon dan hasil analisis serta pembahasan, yakni pembahasan tentang Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran pada penelitian.

